

Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye

Khoirunnisa Nur Agustyati

Yayasan Perludem

Variabel Sistem Pemberian Suara

- Sistem pemilu dan penentuan jenis metode pemberian suara (partai/ kandidat/preferensial)
- Konsekuensi dari jenis metode pemberian suara
 - Pola persaingan;
 - Kemudahan pemilih dan perilaku pemilih;
 - Model representasi;
 - Pelembagaan partai dan sistem kepartaian.

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

- Pemilih dapat memilih langsung caleg yang menjadi preferensinya
- Persaingan terjadi tidak hanya antarpartai tetapi juga di internal partai
- Menitikberatkan pada *personal vote*
- Peran partai politik terbatas pada mengajukan daftar calon
- Pilihan sistem ini berpengaruh pada model dan jenis kampanye yang berpengaruh terhadap bagaimana pengelolaan dana kampanye
- Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak calon anggota legislatif

Alasan Melakukan Politik Uang

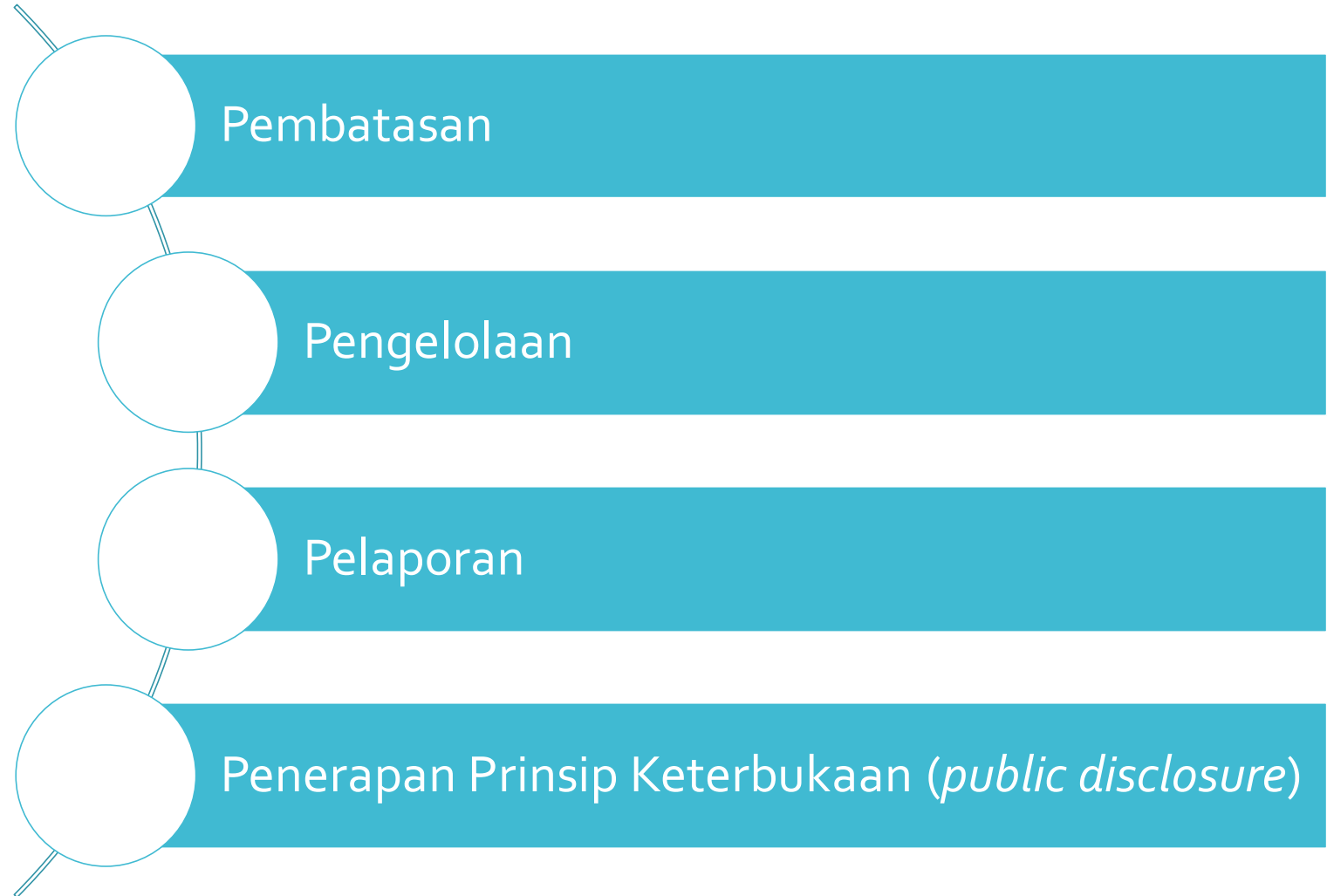
Alasan Melakukan Politik Uang	Persentase
Jalan pintas menang pemilu	56,6%
Tidak percaya diri dengan visi-misi	16,0%
Pragmatisme politik	12,7%
Memanfaatkan kondisi perekonomian rakyat	4,7%
Tidak adanya kejujuran	1,1%
Tidak tahu	8,9%

Survei Litbang Kompas, September 2018

Sumber Resmi untuk Memberikan Sumbangan Dana Kampanye



Materi Pokok Pengaturan Dana Kampanye



Laporan Dana
Kampanye



LADK



LPSDK?



LPPDK

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu 2019

PARTAI POLITIK	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			SUMBANGAN PESERTA PEMILU		PENERIMAAN LAIN-LAIN	
	PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN	PARTAI POLITIK	CALEG	LAIN-LAIN KOMITMEN	BUNGAN BANK
PKB	1.300.000.000		7.425.000.000	10.000.000	133.587.647.279		
Gerindra				1.006.771.946	133.715.077.635		
PDIP				6.675.680.601	338.339.772.456		9.624.760
Golkar	100.000.000		395.000.000	72.010.000.000	235.131.587.510		2.290.194
Nasdem			1.000.000.000	80.610.513.963	177.863.557.751		
Garuda	400.000.000			31.000.000	3.044.515.041		
Berkarya	1.200.000.000			100.000.000	105.864.300.058		
PKS	1.000.000.000			9.376.131.477	139.666.622.439		
Perindo				88.134.658.000	123.606.099.035	16.497.617.400	
PPP				12.413.250.000	64.138.502.526		
PSI	3.809.570.046		6.270.503.540	31.922.379.050	42.657.646.880		87.269
PAN				100.000.000	168.948.328.526		
Hanura	13.000.000	9.522.500.000		11.104.310.300	28.858.287.278		19.236
Demokrat	7.158.137.000			1.700.957.452	180.871.110.071		2.449.086
PBB				501.534.722	117.356.000.002		
PKPI	4.761.004.000			-	1.530.743.254		
Jumlah	19.741.711.046	9.522.500.000	15.090.503.540	315.697.187.511	1.995.179.797.741	16.497.617.400	14.470.545
Porsi Penerimaan %	0,83	0,40	0,64	13,31	84,12	0,70	0,00
Total Keseluruhan							2.371.743.787.783

Sumber: LPPDK Pemiluu 2019

Perbandingan Sumbangan Caleg Pada LPSDK dan LPPDK

No	Partai	Sumbangan Caleg pada LPSDK	Sumbangan Caleg pada LPPDK
1	PKB	IDR17.707.581.614	IDR 133.587.647.279,00
2	Gerindra	IDR51.038.013.282	IDR 133.715.077.635,00
3	PDIP	IDR11.266.370.122	IDR 338.339.772.456,00
4	Golkar	IDR19.599.271.357	IDR 235.131.587.510,00
5	Nasdem	IDR22.708.828.512	IDR 177.863.557.751,00
6	Garuda	IDR1.750.000.000	IDR 3.044.515.041,00
7	Berkarya	IDR2.821.000	IDR 105.864.300.058,00
8	PKS	IDR33.622.635.000	IDR 139.666.622.439,00
9	Perindo	IDR62.101.764.919	IDR 123.606.099.035,00
10	PPP	IDR-	IDR 64.138.502.526,00
11	PSI	IDR20.315.924.664	IDR 42.657.646.880,00
12	PAN	IDR53.491.554.750	IDR 168.948.328.526,00
13	Hanura	IDR11.988.064.632	IDR 28.858.287.278,00
14	PD	IDR31.317.158.084	IDR 180.871.110.071,00
19	PBB	IDR219.500.116	IDR 117.356.000.002,00
20	PKPI	IDR726.805.251	IDR 1.530.743.254,00
	Total	IDR337.856.293.303	IDR 1.995.179.797.741,00

Dana Kampanye dan Integritas Pemilu

Uang adalah salah satu isu sentral di dalam kontestasi pemilu. Menentukan bagaimana kontestasi berjalan, bahkan pemenang pemilu



Penggunaan uang diperbolehkan, bahkan dalam jumlah besar, tetapi berbasiskan transparansi dan akuntabilitas

Keseuaian Laporan Dana Kampanye dengan Fakta di Lapangan?

- Apakah laporan dana kampanye mencerminkan fakta pengeluaran kampanye di lapangan?
- Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terbatas pada kesesuaian pada waktu pelaporan dana kampanye
- Prosedur audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) terbatas bahwa pada informasi yang tertuang pada laporan dana kampanye yang disampaikan pada KAP
- Caleg hanya melaporkan dana kampanye ke partai politik, tidak wajib menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU

Regulasi Dana Kampanye dan Daya Jangkauannya Terhadap Realitas



Regulasi Dana Kampanye dan Daya Jangkauannya Terhadap Realitas

Bawaslu punya kewenangan memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye

Konsolidasi Kewenangan belum maksimal (Bawaslu, PPK, OJK, KPK)

